

PENGUKURAN TINGKAT DAYA SAING KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPRI

Sinarti¹⁾, Dwi Kartikasari²⁾, Bambang Hendrawan³⁾, Ari Wibowo⁴⁾

* Batam Polytechnics

Managerial Accounting study Program

Parkway Street, Batam Centre, Batam 29461, Indonesia

sinar@polibatam.ac.id¹⁾ dwi@polibatam.ac.id²⁾

benks@polibatam.ac.id³⁾ ari@polibatam.ac.id⁴⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana tingkat daya saing yang dimiliki oleh 7 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Batam. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer, data sekunder diperoleh dari BPS Kepri sedangkan data primer berupa kuesioner disebarikan ke beberapa orang yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijadikan responden dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa Kota Batam memiliki daya saing tertinggi diikuti secara berturut-turut oleh Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Anambas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah provinsi Kepulauan Riau dalam pembuatan kebijakan sehingga dapat lebih memaksimalkan daya saing yang dimiliki setiap Kabupaten/Kota.

Kata kunci: Tingkat daya saing, Kota, Kabupaten.

Abstract

This study aims to examine the extent of competitiveness owned by 7 regencies/cities in Riau Islands Province, especially Batam. This study uses secondary data and primary data, secondary data is obtained from BPS Kepri while primary data in the form of questionnaires are distributed to several people who are considered to meet the requirements to be used as respondents in this study. This research is a qualitative descriptive study. The result showed that Batam City has the highest competitiveness followed by Tanjung Pinang, Bintan, Lingga, Karimun, Natuna, and Anambas respectively. It is hoped that the results of this study can provide input for the government, especially the Riau Islands provincial government in policy making so as to maximize the competitiveness of each regency/city.

Keywords: Competitiveness, City, Regency

1. Pendahuluan

Provinsi Kepulauan Riau sebagai hasil dari pemekaran wilayah terbentuk sejalan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah sejak tahun 1998, masyarakat Kabupaten kepulauan Riau secara bersama-sama berkeinginan dan menuntut untuk membentuk kabupaten baru. Keinginan dan tuntutan tersebut akhirnya memberikan hasil yaitu dengan terbentuknya Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 menjadi daerah otonom baru disamping Kabupaten Kepulauan Riau sebagai kabupaten induk. Kota Administratif Tanjung pinang

berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 statusnya ditingkatkan dari kota administratif menjadi Kota Tanjung pinang (kota otonom).

Masyarakat Kepulauan Riau pada bulan Mei tahun 1999 menyelenggarakan musyawarah besar masyarakat Kepulauan Riau dengan salah satu kesepakatannya mengamanatkan suatu keinginan untuk menjadi daerah provinsi sendiri disamping tuntutan pemekaran kabupaten-kabupaten baru. Melalui dukungan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, DPRD, dan masyarakat dari Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota

Tanjungpinang, secara bersama-sama mengajukan usulan kepada pemerintah pusat agar Provinsi Kepulauan Riau segera dibentuk dan terpisah dari Provinsi Riau. Perjuangan tersebut akhirnya menghasilkan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002, dengan ibukota Tanjung Pinang [11]. Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, 59 Kecamatan serta 351 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil. Terdapat 40% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 Km², 95% wilayahnya merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat. Provinsi Kepri berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan Brunei Darussalam [16].

Di antara 7 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Kepulauan Riau, Batam merupakan pulau yang sangat mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat karena Batam merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura yang secara keseluruhan membentuk wilayah Batam. Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Hanya terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hamparan hutan belantara.

Pada tahun 1970-an Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina kemudian berdasarkan Kepres No. 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Dalam rangka

melaksanakan visi dan misi untuk mengembangkan Batam, maka dibangun berbagai infrastruktur modern yang berstandar internasional serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik.

Beberapa tahun belakangan ini telah digulirkan penerapan Free Trade Zone Batam (FTZ Batam), Bintan, dan Karimun yang mengacu pada UU No 36 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan kemudian dirubah beberapa kali melalui PERPU, sehingga di undangkan menjadi UU no 44 tahun 2007. Ada juga Undang-Undang 36 tahun 2000 Tentang " Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang Undang serta masih banyak Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan FTZ Batam, kemudian di saat masa akhir jabatan anggota DPR Pusat tahun 2009, bersama dengan pemerintah pusat dibahas mengenai UU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan memayungi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di daerah Batam dan daerah lainnya di Indonesia [5], [80].

Berbagai kemajuan telah banyak dicapai selama ini, seperti tersedianya berbagai lapangan usaha yang mampu menampung angkatan kerja yang berasal hampir dari seluruh daerah di tanah air. Begitu juga dengan jumlah penerimaan daerah maupun pusat dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini tidak lain karena semakin maraknya kegiatan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata [2].

Batam sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia sangat perlu diketahui kemampuan daya saingnya demikian juga beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat bersaing dengan negara ASEAN lainnya terkait pembelakuan MEA di negara-negara ASEAN. Terdapat beberapa indikator untuk mengukur daya saing wilayah yaitu perekonomian, infrastruktur dan sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia seperti yang digunakan dalam penelitian Irawati, dkk [15], penelitian Millah [18], Alisjahbana, dkk [1].

Asia Competitiveness Institute secara periodik telah menerbitkan analisis daya saing provinsi yang

ada di Indonesia tetapi belum dijabarkan dalam kabupaten atau kota. Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang tingkat daya saing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Batam, Bintan, dan Karimun.

Rumusan Masalah

Provinsi Kepulauan Riau selain sebagai provinsi hasil pemekaran, posisi Provinsi Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Brunei Darussalam akan memberikan tantangan yang besar khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah dimulai pada tahun 2015. Provinsi Kepulauan Riau dituntut memiliki daya saing kawasan yang tinggi agar tidak tertinggal dari negara tetangga lainnya khususnya Singapura karena awal pembentukan salah satu wilayahnya yaitu Batam adalah untuk dapat bersaing dengan kawasan sejenis di Asia Pasifik, sehingga perlu diketahui bagaimana tingkat daya saing kawasan kepulauan Kepri khususnya Batam, Bintan, dan Karimun.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Daya Saing Nasional

Terdapat banyak pendapat tentang apa itu daya saing nasional, beberapa ahli mengatakan bahwa daya saing adalah sebuah fenomena makroekonomi yang dipicu oleh variabel seperti *exchange rates*, *interest rate*, dan *government deficits*. Sebagian lagi berpendapat bahwa daya saing adalah fungsi dari tersedianya tenaga kerja yang banyak dan murah. Ada juga yang menghubungkan daya saing dengan tersedianya sumberdaya alam yang melimpah, tetapi menurut Porter [18] makna dari daya saing bagi sebuah negara adalah produktivitas karena tujuan utama dari sebuah negara adalah menghasilkan dan meningkatkan standar hidup warga negaranya. Kemampuan tersebut tergantung pada produktifitas tenaga kerja dan modal kerja yang digunakan.

Produktifitas adalah nilai dari output yang dihasilkan oleh setiap unit tenaga kerja atau modal yang digunakan. Produktifitas tergantung pada kualitas dan fitur produk serta efisiensi dalam memproduksi produk tersebut. Produktifitas adalah penentu utama standar hidup jangka panjang suatu negara; hal ini yang akan menjadi penyebab pendapatan per kapita sebuah negara sehingga dapat dikatakan bahwa meningkatnya daya saing sebuah

negara dapat dilihat dari output atau produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara.

2.2 The diamond of national advantage

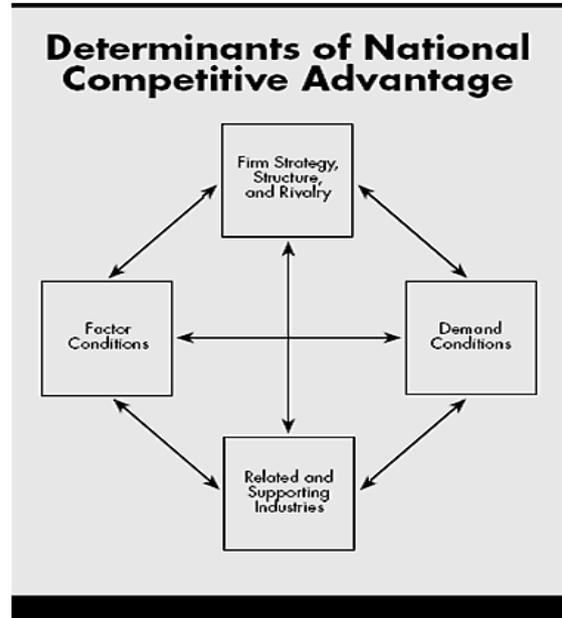
Porter [18] berpendapat bahwa peningkatan produktifitas industri di sebuah negara tergantung pada empat atribut yang melekat pada negara tersebut yang dikenal dengan *The diamond of national advantage*. Model ini secara akurat menyatukan variabel-variabel penting yang menentukan kemampuan bersaing sebuah negara menjadi satu model. Empat komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondisi Faktor (*Factor conditions*). yaitu posisi negara yang berhubungan dengan faktor produksi seperti tenaga kerja yang terampil atau infrastruktur. Porter memisahkan antara faktor dasar dengan faktor lanjut. Faktor dasar mencakup sumber daya alam, iklim, lokasi, tenaga kerja tidak terampil dan semi terampil, dan modal utang. Faktor lanjut mencakup infrastruktur komunikasi modern dan personalia yang berpendidikan tinggi seperti insinyur dan ilmuwan. Porter [18] berpendapat bahwa faktor lanjut saat ini merupakan faktor yang paling signifikan untuk keunggulan kompetitif.
2. Kondisi Permintaan (*Demand conditions*). yaitu sifat *home-market demand* untuk produk atau jasa Tingkat pertumbuhan permintaan negara asal (*home-market demand*) dapat lebih penting bagi keunggulan kompetitif daripada ukuran absolutnya. Pertumbuhan domestik yang cepat mengarahkan perusahaan dari sebuah negara untuk menggunakan teknologi baru yang lebih cepat, dengan mengurangi rasa ketakutan bahwa teknologi seperti ini akan menjadikan investasi yang telah ada menjadi sia-sia, dan membangun fasilitas yang besar dan efisien dengan kepercayaan bahwa fasilitas tersebut akan digunakan [18]. Sebagai tambahan, perusahaan dari sebuah negara memperoleh keunggulan kompetitif jika para pembeli domestiknya berpengalaman dan memiliki permintaan dalam artian barang dan jasa [18]. Dapat dihipotesiskan

bahwa suatu tingkat pendidikan konsumen yang lebih tinggi akan meningkatkan permintaan.

3. Industri Terkait dan Pendukung (*Related and supporting industries*). Industri terkait dan pendukung adalah industri tempat perusahaan melakukan koordinasi atau berbagi aktivitas dalam rantai nilai dan industri yang melibatkan produk yang melengkapi perusahaan dari suatu negara tertentu. Industri ini mungkin memiliki ikatan ke belakang dan ke depan yang kuat dengan perusahaan-perusahaan dalam suatu sektor tertentu. Transportasi diukur dengan jalan yang beraspal (km/juta orang) dan komunikasi diukur dengan jaringan telepon (per 100 orang). Infrastruktur untuk bisnis internasional sifatnya sangat penting karena infrastruktur untuk angkutan internasional diukur dengan lingkup tempat infrastruktur angkutan udara internasional memenuhi persyaratan bisnis. Infrastruktur untuk komunikasi internasional diukur dengan lalu lintas teleks internasional dalam artian lalu lintas dalam menit per kapita.
4. Strategi Perusahaan, Struktur, dan Persaingan (*Firm Strategy, Structure, and Rivalry*). Penentu akhir dari kemampuan bersaing sebuah negara mencerminkan konteks ketika perusahaan diciptakan, diorganisir, dan dikelola. Keunggulan nasional dapat dihasilkan dari suatu kecocokan antara variabel-variabel ini. Meskipun demikian, Porter [18] menemukan bahwa tidak ada suatu sistem manajerial yang secara universal sesuai. Sebaliknya, ia mengungkapkan preferensi yang kuat dalam dukungan persaingan domestik yang ketat untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di dalam suatu industri. Porter [18] berpendapat bahwa persaingan domestik superior terhadap persaingan dengan para pesaing asing. Persaingan internasional dapat diukur dengan keterbukaan pada produk asing yang merupakan lingkup ketika proteksionisme nasional tidak mencegah produk yang kompetitif yang diimpor.

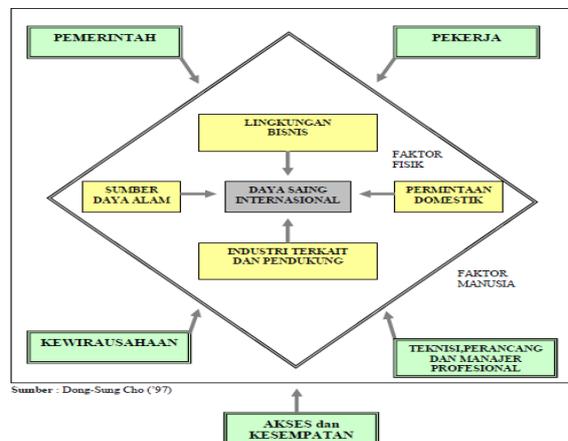
The diamond of national advantage dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. *The diamond of national advantage*
Sumber: Porter (1990)

2.3 Model 9 Faktor

Model 9 faktor yang diciptakan oleh Dong-Sung Cho merupakan pengembangan dari model berlian Porter. Menurut Dong-Sung Cho, kita membutuhkan model yang bisa mengatakan pada kita bukannya seberapa banyak tingkat sumber daya yang sekarang dimiliki oleh suatu negara, tetapi siapa yang menciptakan sumber daya dan kapan seharusnya setiap sumber daya itu diciptakan. Model 9 faktor dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini [6].



Gambar 2. Model 9 faktor

Perbedaan model 9 faktor dari model berlian adalah faktor yang terletak di luar kotak berlian, yaitu keberadaan 4 faktor yang meliputi tenaga kerja, birokrasi dan politisi, kewirausahaan, serta teknisi, perancang, dan manajer profesional. Termasuk juga faktor akses dan kesempatan yang merupakan faktor yang mempertajam daya saing internasional. Secara umum posisi faktor-faktor tersebut dapat tumbuh secara alamiah, meskipun sangat tergantung pada keadaan masing-masing negara (lihat skema pada Tabel 1):

Tabel 1. Skema berdasarkan status ekonomi negara/daerah

Status ekonomi	Negara terbelakang	Negara berkembang	Negara setengah maju	Negara maju
Faktor fisik	Sumberdaya alam	Lingkungan bisnis	Industri yang terkait dan pendukung	Permintaan domestik
Faktor manusia	Pekerja/karyawan	Politisi dan birokrasi	Kewirausahaan	Teknisi, perancang, manajer profesional

2.4 Daya Saing Daerah

Secara konsep, daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan dan dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat, apalagi dengan semakin terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk impor masuk ke daerah-daerah, tentunya usaha-usaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur. Ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Setiap daerah dituntut untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menciptakan ide-ide baru, perbaikan-perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, industri baru, lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan [7].

Dalam rangka membangun daya saing daerah, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa hal, antara lain: (a) Memetakan potensi daerah berikut supply dan demand, (b) Memperkuat seluruh

infrastruktur ekonomi untuk mendorong potensi daerah, termasuk SDM-nya, (c) Menguasai rantai pasokan (hulu-hilir) untuk menekan inefisiensi (sinergi provinsi dan kabupaten /kota), (d) Menciptakan inovasi produk, serta (e) Mendorong ekonomi rakyat dengan terus meningkatkan penggunaan produksi lokal. Akhirnya, kesiapan kapabilitas pemerintah daerah perlu didukung oleh peningkatan kemampuan dalam mengelola keuangan daerahnya [9]. Kualitas sumber daya manusia perlu dipersiapkan, sehingga dana yang dimiliki dapat dikelola dengan efektif dan secara bertahap dapat membangun daya saing pemerintah daerah di Indonesia [7].

2.5 Indikator Utama Daya Saing Daerah.

Berdasarkan *The Global Competitiveness Report 2014-2015*, yang diterbitkan oleh *World Economic Forum*, daya saing (*competitiveness*) didefinisikan sebagai kumpulan institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktifitas sebuah negara. Tingkat produktifitas akan menentukan tingkat kemakmuran yang akan dicapai oleh suatu perekonomian. Tingkat produktifitas juga menentukan *Rate of Return* yang diperoleh investasi dalam suatu perekonomian yang pada gilirannya merupakan *fundamental drivers* dari *growth rates* perekonomian tersebut, dengan kata lain perekonomian yang lebih kompetitif merupakan salah satu perekonomian yang akan tumbuh lebih cepat sepanjang waktu.

Konsep daya saing melibatkan komponen yang statis dan dinamis, meskipun produktifitas sebuah negara menentukan kemampuannya untuk mempertahankan *high level of income*, produktifitas juga merupakan determinan utama dari *Return On Investment* yang merupakan salah satu faktor kunci yang menjelaskan *economy's growth potential*.

Banyak faktor penentu yang mendorong produktifitas dan daya saing, tetapi dalam laporan yang diterbitkan oleh World Economic Forum tahun 2014 komponen penentu daya saing dikelompokkan dalam 12 pilar yaitu:

1. Lembaga (*Institutions*).

2. Infrastruktur.
3. Lingkungan makroekonomi (*macroeconomic environment*)
4. *Health and primary education*
5. *Higher education and training*
6. *Good market efficiency*
7. *Labor market efficiency*
8. *Fiancial market development*
9. *Technological readiness*
10. *Market size*
11. *Business sophistication*
12. *Innovation*

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memperoleh Informasi tentang tingkat daya saing Kabupaten/Kota khususnya Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan KEK di Provinsi Kepri.
2. Menganalisis potensi daya saing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah memperkaya informasi tentang daya saing kawasan yang ada di Indonesia dan meningkatkan jumlah penelitian yang ada di Indonesia. Manfaat praktis penelitian ini adalah dapat dijadikan evaluasi tentang kinerja pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan daya saing kawasan serta dapat menjadi masukan bagi penentu kebijakan terkait kebijakan pembangunan di wilayah Kepulauan Riau khususnya Batam, Bintan, dan Karimun.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel penelitian Irawati dkk [15] yaitu:

1. Variabel perekonomian daerah adalah kondisi perekonomian di suatu daerah dilihat dari sisi ekonomi makro. Variabel ini akan diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan PDRB, PDRB Per Kapita.

2. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam. Menurut *American Public Works Association*, infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Sumber daya Alam adalah sumberdaya yang bersumber dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator Luas Wilayah, Panjang Jalan Per Luas Wilayah, Kualitas Jalan Raya.
3. Sumberdaya Manusia adalah sumberdaya yang berasal dari manusia itu sendiri. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator Angkatan Kerja, Persentase Angkatan Kerja, Persentase Penduduk Usia Produktif Terhadap Total Penduduk, Jumlah Penduduk yang Bekerja, Rasio Jumlah Pengajar terhadap Siswa. Definisi dan pengukuran variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Pengukuran
PDRB	PDRB pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu dengan harga konstan 2010 (bps.go.id)	PDRB 2016
Laju Pertumbuhan PDRB	Menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya dengan harga konstan 2010	$= \frac{PDRB_n - PDRB_{n-1}}{PDRB_{n-1}}$
PDRB Per Kapita	PDRB dibagi dengan jumlah penduduk	$= \frac{PDRB}{\sum \text{penduduk}} \times 100 \%$
Luas Wilayah	Merupakan luas wilayah di suatu daerah	Luas Wilayah Daerah
Panjang Jalan Per		Panjang Jalan $= \dots \times 100\%$

Luas Wilayah		Luas Wilayah
Kualitas Jalan Raya	Merupakan ukuran panjang jalan raya menurut kondisi jalan	Panjang jalan menurut kondisi jalan
Angka Kerja	Menunjukkan jumlah penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja	Jumlah penduduk angkatan kerja
Persentase Angkatan Kerja	Jumlah penduduk angkatan kerja dibandingkan dengan total penduduk	$\frac{\text{Angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Persentase Penduduk Usia Produktif terhadap Total Penduduk	Perbandingan antara penduduk usia produktif dengan total penduduk di suatu wilayah	$\frac{\text{Penduduk usia produktif}}{\text{Total Penduduk}} \times 100\%$
Jumlah Penduduk yang bekerja	Menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja	Jumlah penduduk yang bekerja
Pengangguran	Menunjukkan jumlah penduduk usia produktif yang tidak bekerja	Jumlah penduduk usia produktif yang tidak bekerja
Rasio Jumlah Pengajar terhadap Siswa	Menunjukkan perbandingan antara jumlah pengajar dan jumlah siswa yang ada di suatu wilayah	$\frac{\text{Jumlah guru}}{\text{Jumlah siswa}}$

Sumber: BPS Kepri

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tahapan penelitian:

1. Tahap pengumpulan data yaitu pengumpulan data primer untuk mengetahui pendapat para ahli atau orang yang berkompeten di bidangnya yang akan memberikan bobot atas perbandingan relatif antar sub variabel untuk digunakan dalam *Analytical Hierarchy Process (AHP)* dan data sekunder untuk memperoleh data dari setiap indikator yang digunakan.
2. Tahapan analisis. Pertama, Mengidentifikasi bobot prioritas atau tingkat kepentingan relatif antar indikator menggunakan *Analytical Hierarchy Process (AHP)* dalam satu variabel

untuk masing-masing variabel. Kedua, mengukur tingkat daya saing berdasarkan nilai variabel.

4. Hasil dan Pembahasan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer, diperoleh dari 14 orang yang dianggap kompeten di bidangnya yaitu:

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Kabid. Pembinaan Dr. Muhammad Dali, MM.
2. Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Kepri, Kepala, Herry Andrianto, SE., MM.
3. Badan Pengusahaan Batam, Ir. Budiman Maskan, MM.
4. Dinas Pendapatan Daerah Pemko Batam, Staf KPRD, Wuryarini, SE.
5. Kantor Pertanahan Kab Karimun, Ka Ur Umum dan Kepegawaian, Bayu Witopo, A.Md.
6. Perwakilan Industri: Direktur PT Austin Engineering Indonesia, Nuriyanto, <http://www.austineng.com.au/contact/austin-indonesia/>
7. Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk
8. Perwakilan Industri: Assembly Engineering Manager, PT Unisem Batam, Mulia Ali Akbar
9. Perwakilan Industri: HRD Manager, PT Unisem Batam, Arif Rahman Hakim.
10. Perwakilan Industri: SEC Manager, PT Unisem Batam, Mustanir.
11. Walikota Batam, Muhammad Rudi, SE.
12. Anggota DPR Kepri, Mantan Walikota Batam, Nyat Kadir.
13. Camat Batu Aji, Drs. Rinaldi M. Pane.
14. Perwakilan Industri: Asst. Manager, PT Sat Nusa Persada, Tbk, Agus Susanta.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yaitu:

- 1 Variabel perekonomian daerah, dengan sub variabel:
 - a. X1= PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
 - b. X2= Laju Prtumbuhan PDRB
 - c. X3= PDRB Per Kapita

2 Variabel Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (SDA), dengan sub variabel:

- Y1= Luas Wilayah
- Y2= Panjang Jalan Per Luas Wilayah
- Y3= Kualitas Jalan Raya

3 Variabel sumber daya manusia (SDM), dengan sub variabel:

- Ketenagakerjaan:
 - Z1= Angkatan Kerja
 - Z2= Persentase Angkatan Kerja
 - Z3= Persentase Penduduk Usia Produktif terhadap Total Penduduk
 - Z4= Jumlah Penduduk Yang Bekerja
 - Z5= Pengangguran
- Pendidikan:
 - Z6= Rasio Jumlah Pengajar Terhadap Siswa.

Data kuesioner dianalisis dengan AHP, sehingga diperoleh bobot prioritas. Data sekunder yang diperoleh dari BPS Kepri distandarisasi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai standar} = \frac{\text{Nilai Asli} - \text{Nilai Rerata}}{\text{Deviasi Standar}}$$

Nilai standar apabila 0 berarti sama dengan rerata provinsi, apabila negatif berarti di bawah rerata provinsi, dan apabila positif berarti di atas rerata provinsi. Semakin jauh dari nol, semakin jauh pula dari rerata provinsi (daya saing relatif, bukan absolut). Nilai indikator terbobot adalah perkalian nilai terstandarisasi dengan bobot prioritas.

4.1 Peringkat Daya Saing Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau

Peringkat Daya Saing Kabupaten/Kota Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah

Berdasarkan hasil AHP atas kuesioner yang dibagikan kepada para ahli dan nara sumber, maka berikut ini bobot prioritas dari masing-masing indikator yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Bobot Prioritas Indikator-Indikator Perekonomian Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau

Indikator-indikator Perekonomian Daerah	Bobot Prioritas	Peringkat Relatif
PDRB	0,198	3

Laju Pertumbuhan PDRB	0,498	1
PDRB per Kapita	0,297	2
Total	1,000	

Adapun urutan tingkat daya saing setiap kabupaten/kota untuk variabel perekonomian daerah dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Tingkat Daya Saing Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah

Peringkat	Kabupaten/ Kota	Nilai Indikator Terbobot			Jumlah Indikator Terbobot
		X1	X2	X3	
4	Karimun	(0,45)	1,12	(0,92)	0,20
2	Bintan	(0,31)	0,96	1,33	0,81
5	Natuna	(0,26)	(1,23)	(0,26)	(0,74)
6	Lingga	(0,63)	(0,44)	(1,26)	(0,72)
7	Anambas	(0,30)	(1,30)	(0,47)	(0,85)
1	Batam	2,25	0,58	1,16	1,08
3	Tg Pinang	(0,30)	0,31	0,42	0,22

Sumber: Diolah sendiri

Peringkat Daya Saing Kabupaten/Kota Berdasarkan Variabel Infrastruktur

Berdasarkan hasil AHP atas kuesioner yang dibagikan kepada para ahli dan nara sumber, maka berikut ini bobot prioritas dari masing-masing indikator yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Bobot Prioritas Indikator-Indikator Infrastruktur Di Provinsi Kepulauan Riau

Indikator-indikator Infrastruktur	Bobot Prioritas	Peringkat Relatif
Luas Wilayah	0,154	3
Panjang Jalan per Luas Wilayah	0,399	2
Kualitas Jalan Raya	0,447	1
Total	1,000	

Sumber: Diolah sendiri

Adapun urutan tingkat daya saing setiap kabupaten/kota untuk variabel Infrastruktur dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Tingkat Daya Saing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Variabel Infrastruktur

Peringkat	Kabupaten /Kota	Nilai Indikator Terbobot			Jumlah Indikator r Terbobot
		Y1	Y2	Y3	
5	Karimun	(0,34)	(0,03)	(0,64)	(0,35)
2	Bintan	0,19	(0,38)	1,38	0,49
6	Natuna	1,11	(0,60)	(0,75)	(0,41)
4	Lingga	1,45	(0,39)	(0,37)	(0,10)
7	Anambas	(0,77)	(0,52)	(1,23)	(0,87)
3	Batam	(0,28)	(0,31)	1,10	0,33
1	Tg Pinang	(1,36)	2,23	0,51	0,91

Sumber: Diolah sendiri

Peringkat Daya Saing Kabupaten/Kota Berdasarkan Variabel Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil AHP atas kuesioner yang dibagikan kepada para ahli dan nara sumber, maka berikut ini bobot prioritas dari masing-masing indikator yang dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Bobot Prioritas Indikator-Indikator Sumber Daya Manusia Di Provinsi Kepulauan Riau

Indikator-indikator Sumber Daya Manusia	Bobot Prioritas	Peringkat Relatif
Angkatan Kerja	0,105	6
Persentase Angkatan Kerja	0,120	5
Persentase Penduduk Usia Produktif terhadap Total Penduduk	0,185	3
Jumlah Penduduk yang Bekerja	0,202	2
Pengangguran	0,124	4
Rasio Jumlah Pengajar terhadap Siswa	0,265	1
Total	1,000	

Sumber: Diolah sendiri

Adapun urutan tingkat daya saing setiap kabupaten/kota untuk variabel Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Tingkat Daya Saing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Variabel Sumber Daya Manusia

Peringkat	Kabupaten/Kota	Nilai Indikator Terbobot						Jumlah Indikator Terbobot
		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	
6	Karimun	(0,19)	(1,24)	0,11	(0,18)	0,44	(0,82)	(0,35)
4	Bintan	(0,32)	(0,20)	0,18	(0,32)	(0,17)	0,18	(0,06)
7	Natuna	(0,50)	0,28	(1,06)	(0,50)	(2,01)	(0,62)	(0,73)
3	Lingga	(0,46)	(0,27)	1,42	(0,45)	1,28	(0,96)	(0,01)
5	Anambas	(0,57)	1,37	(1,04)	(0,57)	0,09	(0,46)	(0,32)
1	Batam	2,24	1,12	(0,71)	2,24	0,23	1,62	1,15
2	Tg Pinang	(0,22)	(1,06)	1,10	(0,22)	0,14	1,07	0,31

Sumber: Diolah sendiri

Peringkat Daya Saing Kabupaten/Kota Keseluruhan

Berdasarkan hasil AHP atas kuesioner yang dibagikan kepada para ahli dan nara sumber, maka berikut ini bobot prioritas dari masing-masing indikator yang dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Bobot Ketiga Variabel Di Provinsi Kepulauan Riau

Variabel	Bobot Prioritas	Peringkat Relatif
Perekonomian Daerah	0,120	3
Infrastruktur	0,352	2
Sumber Daya Manusia	0,528	1
Total	1,000	

Sumber: Diolah sendiri

Adapun urutan tingkat daya saing setiap kabupaten/kota untuk ketiga variabel dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Tingkat Daya Saing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Secara Keseluruhan

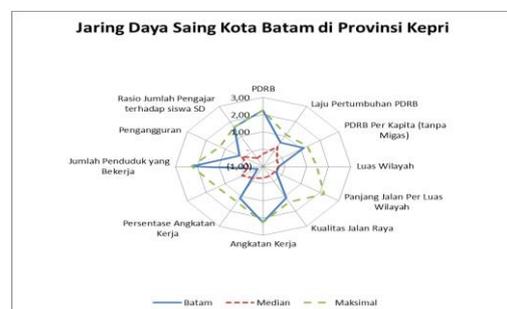
Peringkat	Kabupaten /Kota	Nilai Indikator Terbobot			Jumlah Indikator Terbobot
		X	Y	Z	
5	Karimun	0,02	(0,12)	(0,18)	(0,28)
3	Bintan	0,10	0,17	(0,03)	0,24
7	Natuna	(0,09)	(0,14)	(0,39)	(0,62)
4	Lingga	(0,09)	(0,03)	(0,00)	(0,12)
6	Anambas	(0,10)	(0,31)	(0,17)	(0,58)
1	Batam	0,13	0,11	0,61	0,85
2	Tg Pinang	0,03	0,32	0,17	0,51

Sumber: Diolah sendiri

Berdasarkan data pada Tabel 10, Kota Batam memiliki daya saing tertinggi diikuti secara berturut-turut oleh Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Natuna.

a. Analisis Per Kabupaten/Kota Kota Batam

Grafik jaring daya saing Kota Tanjung Pinang di Provinsi Kepri dapat dilihat pada Gambar 3.



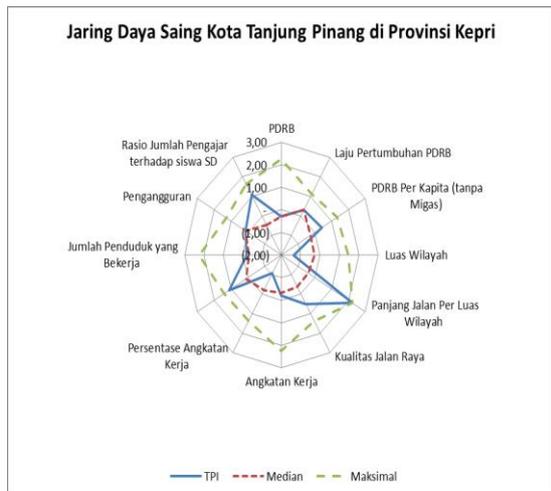
Gambar 3. Grafik Jaring Kota Tanjung Pinang

Sumber: Diolah sendiri

Berdasarkan jaring di atas, terlihat bahwa Batam unggul pada variabel perekonomian daerah dan SDM namun lemah pada variabel infrastruktur, khususnya luas wilayah dan panjang jalan per luas wilayah. Oleh sebab itu, perbaikan infrastruktur di Batam mutlak diperlukan. Kota Batam juga lemah pada sub variabel Persentase Penduduk Usia Produktif terhadap Total Penduduk karena banyaknya penduduk usia non produktif utamanya anak kecil di kota Batam.

Kota Tanjung Pinang

Grafik jaring daya saing Kota Tanjung Pinang di Provinsi Kepri dapat dilihat pada Gambar 4.



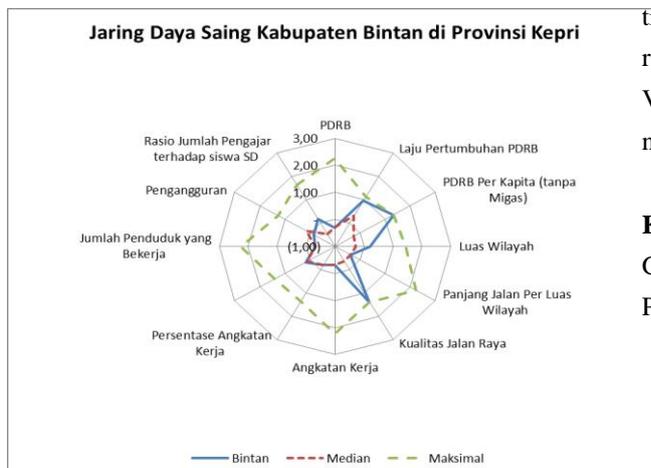
Gambar 4. Grafik Jaring Kota Tanjung Pinang

Sumber: Diolah sendiri

Berdasarkan jaring di atas, Kota Tanjung Pinang, memiliki keunggulan di bidang infrastruktur khususnya panjang jalan per luas wilayah, kemudian disusul oleh variabel perekonomian daerah. Variabel SDM khususnya sub bidang persentase penduduk usia produktif terhadap total penduduk dan sub bidang jumlah pengajar terhadap siswa SD cukup baik tetapi lemah dalam sub variabel angkatan kerja dan luas wilayah.

Kabupaten Bintan

Grafik jaring daya saing Kabupaten Bintan di Provinsi Kepri dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Grafik Jaring Kabupaten Bintan

Sumber: Diolah sendiri

Kabupaten Bintan, dilihat dari diagram di atas, memiliki keunggulan untuk variabel perekonomian daerah khususnya PDRB per kapita tanpa migas dan Laju pertumbuhan PDRB, sedangkan PDRB nya sendiri sama dengan nilai median, keunggulan lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan adalah untuk variabel infrastruktur sub variabel kualitas jalan raya. Kelamahannya adalah terletak pada variabel SDM dan infrastruktur yang berhubungan dengan Luas wilayah dan panjang jalan per luas wilayah.

Kabupaten Lingga

Grafik jaring daya saing Kabupaten Lingga di Provinsi Kepri dapat dilihat pada Gambar 6.



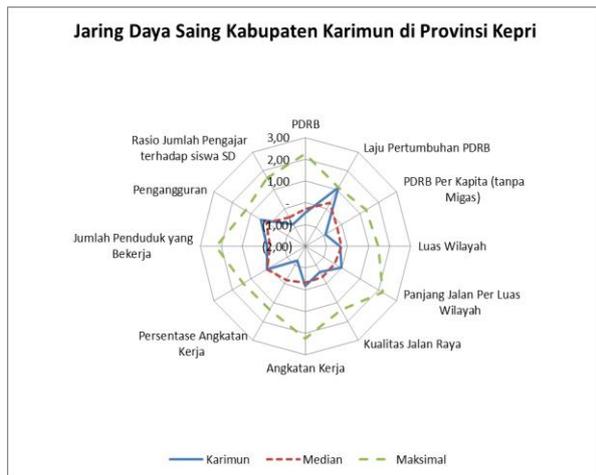
Gambar 6. Grafik Jaring Kabupaten Lingga

Sumber: Diolah sendiri

Berdasarkan diagram di atas diperoleh informasi bahwa untuk Kabupaten Lingga, infrastruktur memiliki keunggulan pada sub variabel luas wilayah tetapi kualitas jalan raya dan panjang jalan raya per luas wilayah berada pada nilai median. Untuk SDM, Lingga memiliki persentase angkatan kerja yang tinggi tetapi jumlah penduduk yang bekerja sangat rendah sehingga pengangguran sangat tinggi. Variabel perekonomian daerah semuanya memiliki nilai di bawah nilai median.

Kabupaten Karimun

Grafik jaring daya saing Kabupaten Karimun di Provinsi Kepri dapat dilihat pada Gambar 7.



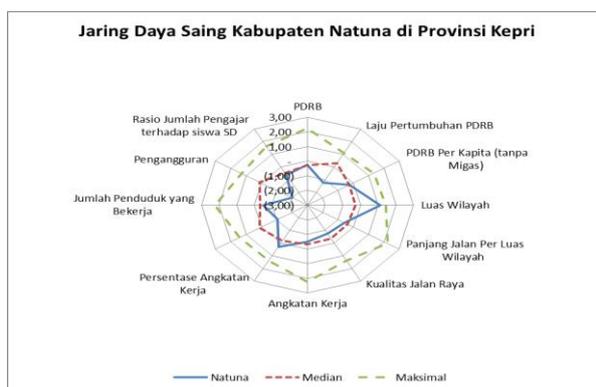
Gambar 7. Grafik Jaring Kabupaten Karimun

Sumber: Diolah sendiri

Berdasarkan diagram di atas, diperoleh informasi bahwa Kabupaten Karimun, untuk variabel perekonomian daerah, kinerja yang baik terlihat pada sub variabel laju pertumbuhan PDRB tetapi PDRB dan PDRB per kapita tanpa migas berada di bawah nilai median. Variabel infrastruktur juga hanya memiliki nilai sedikit lebih tinggi dari nilai median. Kualitas jalan raya masih kurang memadai. Variabel sumberdaya manusia, persentase angkatan kerja sangat rendah, jumlah penduduk yang bekerja juga sedikit sehingga pengangguran juga sedikit.

Kabupaten Natuna

Grafik jaring daya saing Kabupaten Natuna di Provinsi Kepri dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Grafik Jaring Kabupaten Natuna

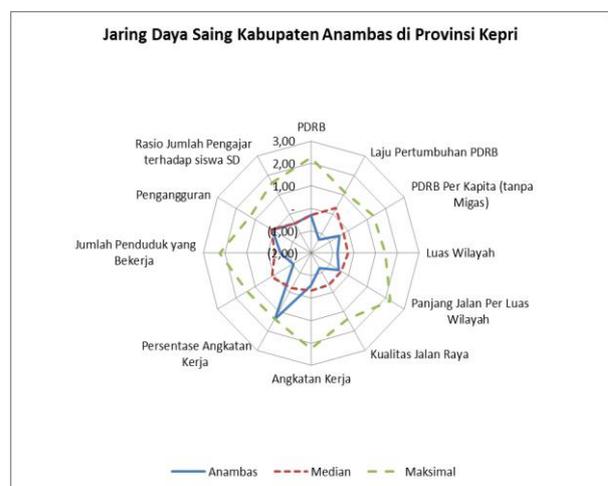
Sumber: Diolah sendiri

Berdasarkan diagram di atas, Kabupaten Natuna memiliki keunggulan untuk sub variabel luas wilayah tetapi kualitas jalan raya dan panjang jalan raya per

luas wilayah berada di bawah nilai median. Variabel perekonomian daerah di Kabupaten Natuna untuk PDRB dan PDRB per kapita tanpa migas berada sedikit di atas nilai median tetapi laju pertumbuhan PDRB berada di bawah nilai median. Variabel SDM untuk sub variabel angkatan kerja berada sedikit di atas nilai median tetapi jumlah penduduk yang bekerja lebih rendah dari nilai median sehingga terdapat pengangguran tetapi sangat rendah.

Kabupaten Anambas

Grafik jaring daya saing Kabupaten Anambas di Provinsi Kepri dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Grafik Jaring Kabupaten Anambas

Sumber: Diolah sendiri

Berdasarkan diagram di atas, Kabupaten anambas memiliki keunggulan untuk variabel SDM yaitu sub Variabel persentase angkatan kerja yang hampir memiliki nilai maksimal tetapi angkatan kerja sangat rendah, jumlah penduduk yang bekerja juga sangat rendah.

Daftar Pustaka

Alisjahbana, Armida S., dkk., “Daya Saing Daerah, Konsep dan Pengukurannya di Indonesia”, BPFE, Yogyakarta, 2002.
 Badan Pengusahaan Batam, “Sejarah Batam”. https://www.bpbatam.go.id/ini/batamGuide/batam_history.jsp, 2017.
 Batam, “Produk domestik regional bruto Kota Batam menurut Lapangan usaha 2011-2015”, Badan Pusat Statistik Kota Batam, Batam, 2016.

- https://batamkota.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Produk-Domestik-Regional-Bruto-Kota-Batam-Menurut-Lapangan-Usaha-2011-2015.pdf
- Batam, “Bintan Karimun jadi KEK”. <http://batampos.co.id/2017/01/31/bintan-karimun-jadi-kek/>, Batam, 2017.
- Cho, Dong-Sung & Moon, Hwy-Chang & Kim, Min-Young, 2008. **"Characterizing international competitiveness in international business research: A MASI approach to national competitiveness,"** Research in International Business and Finance, Elsevier, vol. 22(2), pages 175-192, June.
- Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, “Membangun daya saing daerah”, 2013 <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/22-membangun-daya-saing-daerah>.
- DPR-RI, “Batam ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus” <http://www.tribunnews.com/dpr-ri/2016/05/31/batam-ditetapkan-sebagai-kawasan-ekonomi-khusus>, 2016
- Halim, Abdul, “Akuntansi Keuangan Daerah”, Salemba Empat. Jakarta, 2004. <http://dprd-kepriprov.go.id> <https://kepri.bps.go.id/>
- Hwy, C. Moon. Dong, S. Cho, “National competitiveness: A nine-factor approach and its empirical application”, Journal of international business and economy Fall 2000:17-38, 2000.
- Indonesia, “Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah” 2009. http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
- Irawati, I. Urufi, Z. Resoboen, R.E.I.R. Setiawan, A. Aryanto, “ Pengukuran tingkat daya saing daerah berdasarkan variabel perekonomian daerah, variabel infrastruktur dan sumberdaya alam, serta variabel sumberdaya manusia di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara”, J@TI Undip, Vol VII, No 1, Januari 2012, 2012.
- Kementerian Dalam Negeri, “Provinsi Kepulauan Riau”, 2015. <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/21/kepulauan-riau>.
- Kementerian Luar Negeri, “Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”, 2015. [http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-\(MEA\).aspx](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-(MEA).aspx)
- Millah, A. Nur, “Analisis daya saing daerah di Jawa Tengah. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang”, 2013.
- Porter, Michael.E, “The competitive advantage of nations”, 1990. <https://hbr.org/1990/03/the-competitive-advantage-of-nations> Michael E. Porter.